**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK HAK ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG TINGGAL DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum**

**Oleh :**

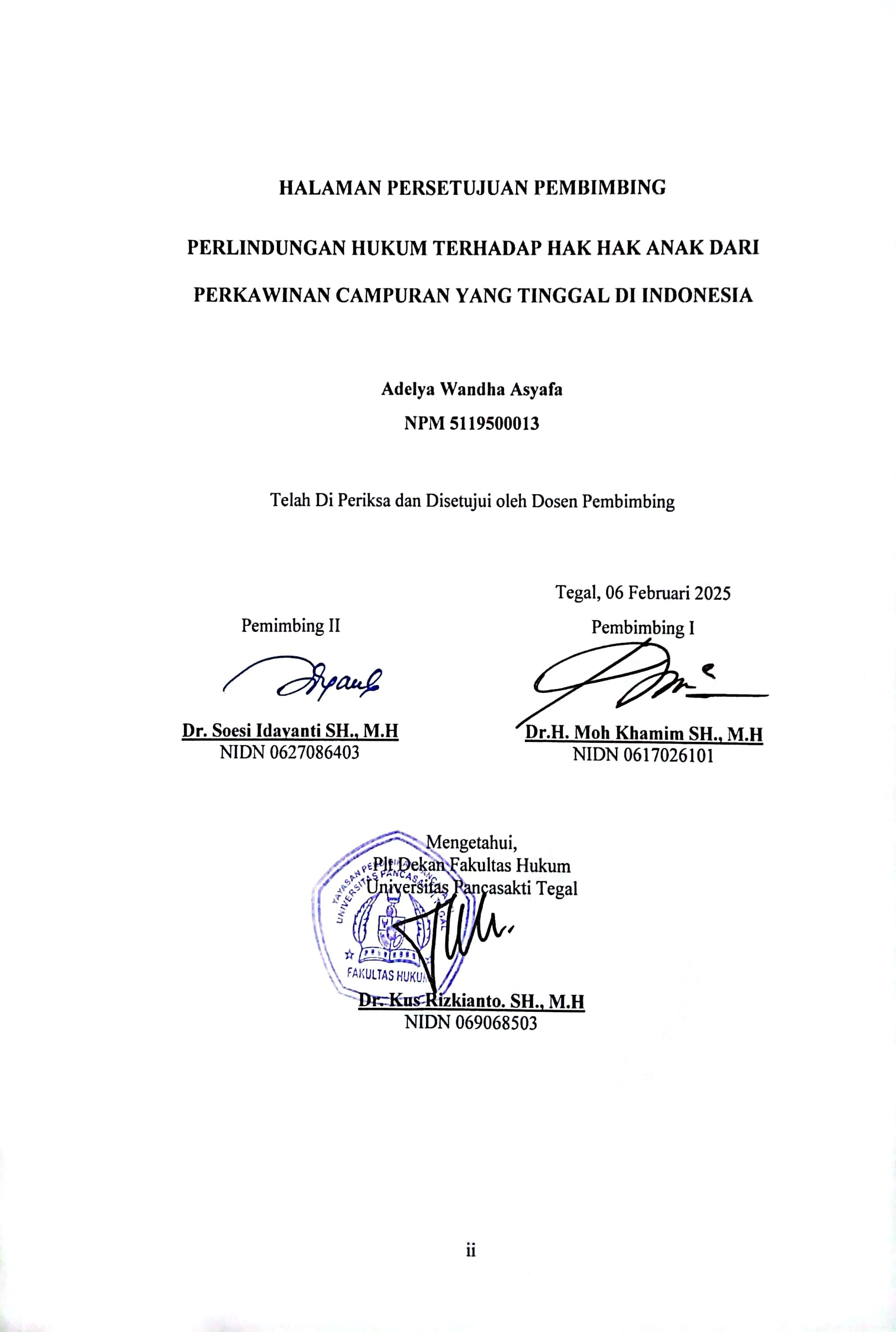
**Adelya Wandha Asyafa**

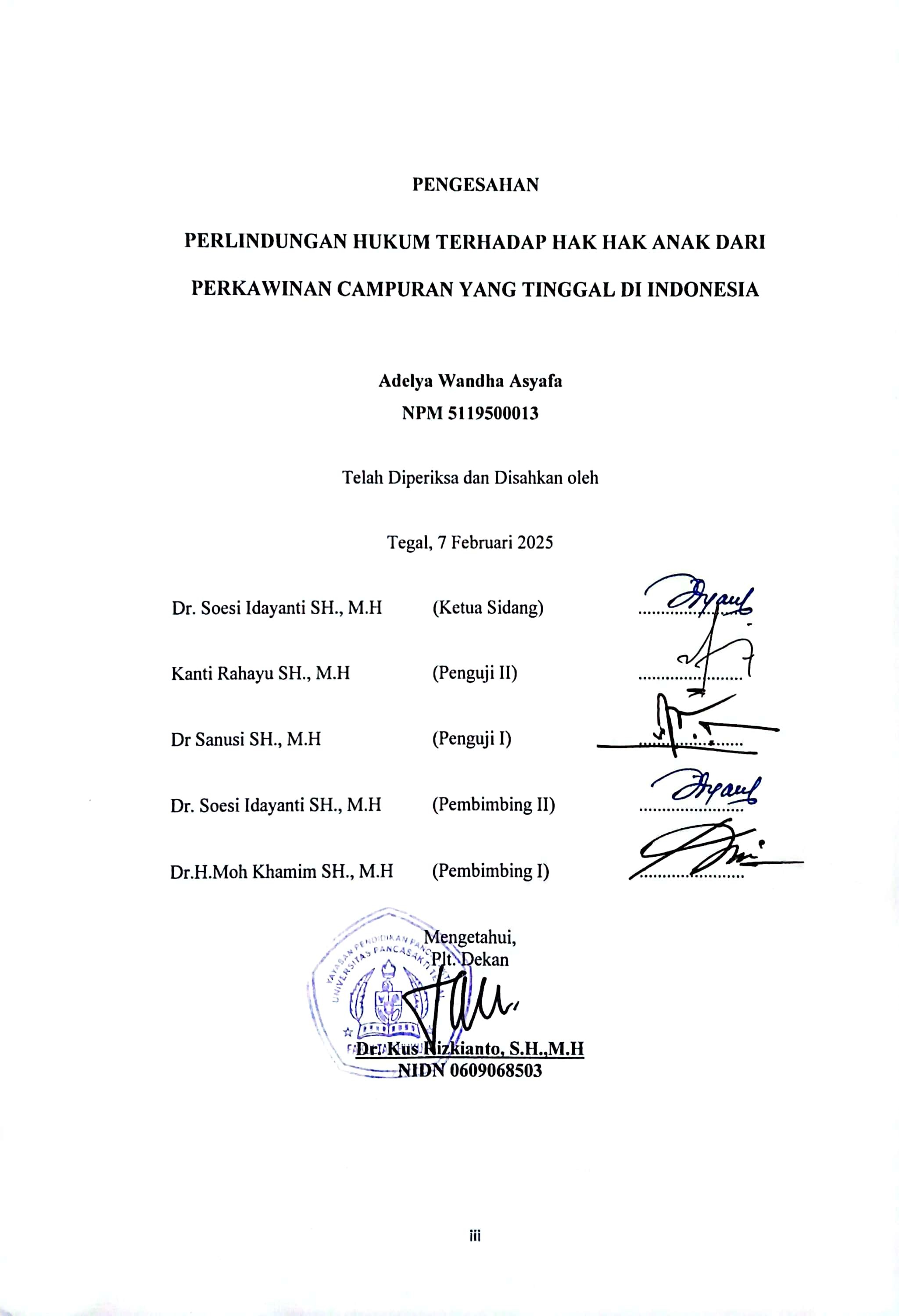
**5119500013**

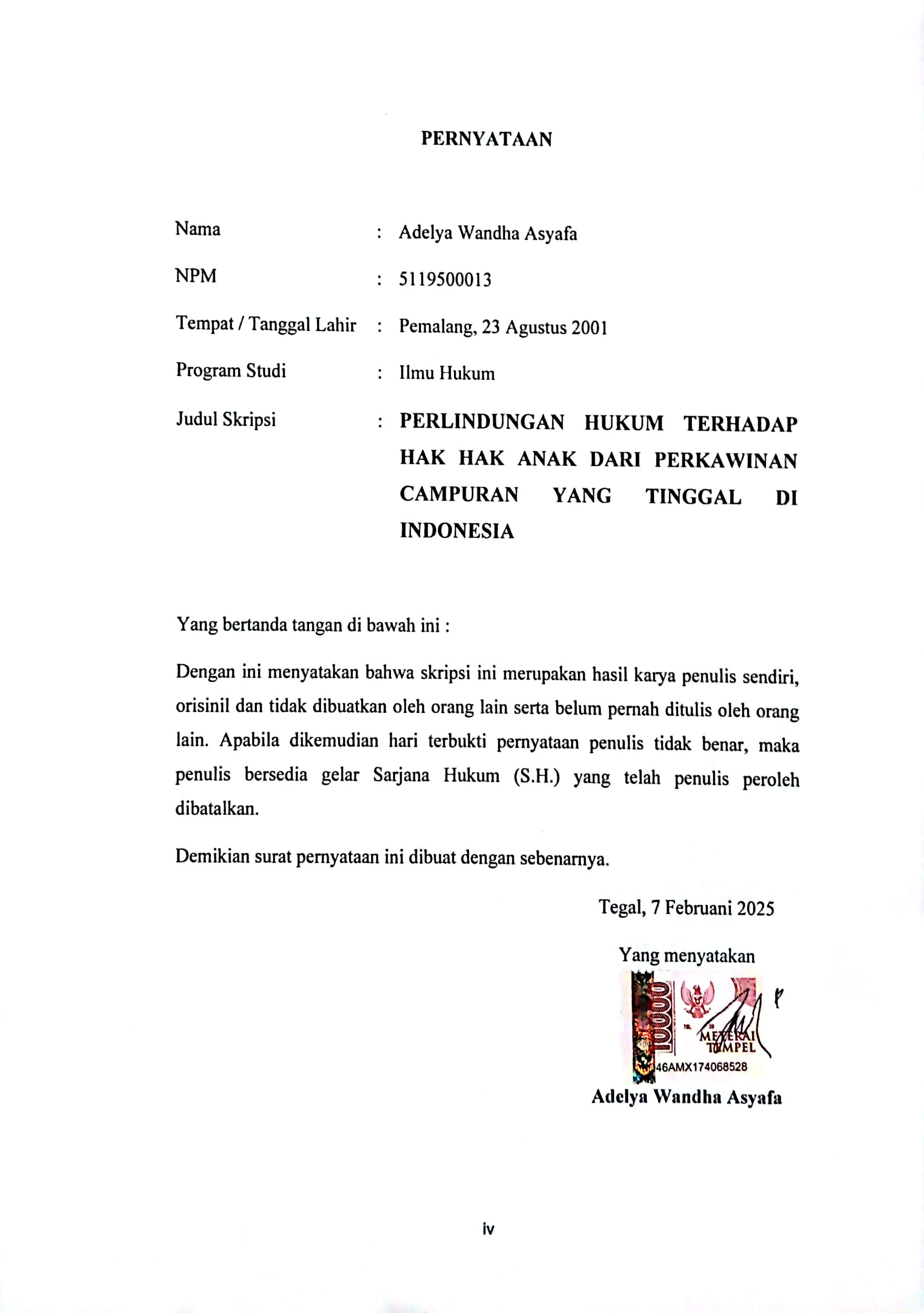
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**







**PERNYATAAN**

Nama : Adelya Wandha Asyafa

NPM : 5119500013

Tempat / Tanggal Lahir : Pemalang, 23 Agustus 2001

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK HAK ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG TINGGAL DI INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 7 Februani 2025

Yang menyatakan

**Adelya Wandha Asyafa**

**ABSTRAK**

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan Dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melangsungkan pernikahan. Anak yang lahir dari pasangan perkawinan campuran berhak memiliki hak kewarganegaraan yang setara dengan anak-anak lainya. Dalam hal ini ketentuan anak hasil perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang menyebutkan bahwa Anak yang lahir dari perkawinan campuran dapat menjadi warga negara Indonesia atau warga negara asing. Anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan ganda hingga berusia 18 tahun atau sudah menikah. Setelah itu, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran di Indonesia meliputi beberapa aspek. Pertama, faktor pribadi yang mencakup perasaan cinta antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) Kedua, faktor ekonomi yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masalah ekonomi dalam keluarga kadang mendorong seseorang untuk menikah dengan warga negara lain.

Ketiga, ada faktor budaya yang meliputi pengaruh kebiasaan dan interaksi antarbudaya

Dampak dari perkawinan campuran termasuk status kewarganegaraan anak, yang dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Dampak budaya dapat memengaruhi kehidupan masyarakat, baik positif maupun negatif.

Penelitian ini bertujuan (1) Mengkaji perlindungan hukum Hak-Hak anak yang lahir dari perkawinan campuran. (2) Untuk mengkaji faktor-faktor terjadinya perkawinan campuran yang ada di indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan Normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sumber data yang digunakan ada 3 (tiga) data primer, data sekunder, dan data tersier. Studi Kepustakaan dipilih menjadi metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, Metode analisis data yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif-analisis

.Hasil penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran dan faktor faktor terjadinya perkawinan campuran yang ada di Indonesia. Terjadinya perkawina campuran terjadi karena terdapat keberagaman ras yang ada. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademis, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Campuran, Hak hak, Anak, Faktor Terjadinya Perkawinan Campuran

***ABSTRACT***

*Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the Almighty God. Early Marriage is a marriage under the age that should not be ready to get married. Children born from mixed marriages have the right to have citizenship rights that are equal to other children. In this case, the provisions for children from mixed marriages are regulated in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia. Which states that children born from mixed marriages can become Indonesian citizens or foreign citizens. The child will have dual citizenship until the age of 18 or is married. After that, the child must choose one of their citizenships. The factors that influence the occurrence of mixed marriages in Indonesia include several aspects. First, personal factors that include feelings of love between Indonesian Citizens (WNI) and Foreign Citizens (WNA). Second, economic factors related to a person's ability to meet their living needs. Economic problems in the family sometimes encourage someone to marry a citizen of another country.*

*Third, there are cultural factors that include the influence of customs and intercultural interactions*

*The impact of mixed marriages including the citizenship status of children, who can have dual citizenship until the age of 18. Cultural impacts can affect people's lives, both positively and negatively.*

*This study aims to (1) Study the legal protection of the Rights of children born from mixed marriages. (2) To study the factors that cause mixed marriages in Indonesia. This type of research is library research. The approach used is Normative through a statute approach. The data sources used are 3 (three) primary data, secondary data, and tertiary data. Literature study was chosen as the method used in collecting data, the data analysis method used in this study is the descriptive-analytical method*

*The results of this study are to examine how the Legal Protection of the Rights of Children Born from Mixed Marriages and the factors that cause mixed marriages in Indonesia. The occurrence of mixed marriages occurs because there is racial diversity. Based on the results of this study, it is hoped that it will become information material and input for students, academics, practitioners, and all parties who need it in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.*

*Keywords: Marriage, Mixed Marriage, Rights, Children, Factors Causing Mixed Marriage*

**MOTTO**

"Pengetahuan adalah kunci kesuksesan yang tak ternilai."

Albert Einstein

"Kesabaran dan ketekunan membawa hasil yang luar biasa."

Napoleon Hill

"Keberhasilan dimulai dengan keberanian untuk mencoba."

Walt Disney

**PERSEMBAHAN**

1. Kedua orang tua ku tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua.
2. Dosen pembimbing Ibu Soesi Idayanti, S.H., M.H. dan Bapak Dr Moh Khamim, S.H., M.H. Terimakasih telah menjadi dosen pembimbing penulis yang sabar dan tidak mempersulit penulis selama pengerjaan skripsi ini, serta mau mengarahkan penulis. Terima kasih banyak berkat Bapak dan Ibu saya bisa melanjutkan skripsi saya sampai dengan selesai.
3. Teruntuk Christoper Bakti Jawak, terimakasih telah menjadi pasangan penulis yang siap mendengarkan keluh kesah dan menemani 24/7 dan menjadi 911 hidup penulis.
4. Sahabat dan Teman angkatan 2019 khususnya Zulfa Mufida dan Maretta Dwi Putri tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin saya sampai disini.

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M. Hum., (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).

2. Dr. Kus Rizkianto. SH., M.H (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).

3. Dr. Soesi Idayanti SH., M.H (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).

4. Dr. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).

5. Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).

7. Bapak Dr.H. Moh Khamim SH., M.H (Dosen Pembimbing I), Ibu Dr. Soesi Idayanti SH., M.H (Dosen Pembimbing II) yang berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.

9. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan dan ramah.

10. Orang tua, serta saudara-suadara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.

11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Pemalang, 06 Februari 2025

Adelya Wandha Asyafa

**DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 6
3. Tujuan Penelitian 6
4. Urgensi Penelitian 6
5. Tinjauan Pustaka 7
6. Metode Penelitian 9
7. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 15

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 15
2. Pengertian Perkawinan 15
3. Syarat Sah Perkawinan 19
4. Asas-Asas Perkawinan 22
5. Tujuan Perkawinan 25
6. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran 30
7. Pengertian Perkawinan Campuran 30
8. Syarat Perkawinan Campuran 34
9. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Dan Perlindungan Anak 35
10. Pengertian Anak 35
11. Hak Dan Perlindungan Anak 39

BAB III HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN 43

1. Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran 43
2. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Campuran Dan Dampak Dari Perkawinan Campuran 58
3. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Campura 58
4. Dampak Dari Perkawinan Campuran 62

BAB IV PENUTUP 66

1. Kesimpulan 66
2. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..............................................................................73

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah akad yang mengesahkan persatuan antara pria dan wanita untuk sebuah prosesi yang harus ditempuh sebagai suami istri untuk saling memiliki satu sama lainya. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak akan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka guna mencapai kebahagiaan sebagai keluarga.[[1]](#footnote-1)

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[2]](#footnote-2) Sebagaimana perkawinan akan tercipta keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, dan harta benda.[[3]](#footnote-3)

Menurut Thalib (1980), Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup Bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan, Menurut Bachtiar (2004) berpendapat bahwa perkawinan adalah pintu bertemunya dua hati dalam naungan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban harus dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan bahagia, serta mendapatkan keturunan.[[4]](#footnote-4)

Makna perkawinan menjadi semakin luas dengan adanya Perkawinan Campuran yaitu perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa, oleh karena itu perkawinan ini juga tunduk pada asas-asas yang berlaku dalam hukum perdata internasional. Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62, Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan”.[[5]](#footnote-5) Dari definisi Pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut :

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewwrganegaraan Indonesia.

Kemudian dalam pasal 58 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraanya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Selain itu peraturan perkawinan campuran tidak diatur dalam fiqh, namun apabila syarat dan rukun telah terpenuhi maka perkawinan tersebut sah.

perkawinan campuran bukan hal yang baru di Indonesia, karena Undang-Undang pun sudah mengatur tentang perkawinan campuran dan adanya pencatatan dalam perkawinan di Indonesia. Dalam prespektif hukum, pernikahan campuran dapat dikelompokan menjadi empat jenis, yaitu antar kelompok, antar lokasi, antar agama, dan antar negara.[[6]](#footnote-6)

Mengingat dalam Perkawinan Campuran itu calon mempelainya tunduk  
pada hukum yang berbeda, maka akan timbul pertanyaan hukum mana yang akan diberlakukan (applicable law). Untuk memecahkan problem hukum mana yang berlaku terhadap Perkawinan Campuran maka berdasar Pasal 2 jo. 6 GemengdeHuwelijken Regeling, intinya hukum yang berlaku adalah hukum calon suami.[[7]](#footnote-7) Selain itu perkawinan campuran memiliki beberapa konsekuensi kewarganegaraan bagi masing-masing pihak perkawinan campuran, yaitu:

1. Kedua belah pihak menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) apabila pihak Warga Negara Asing (WNA) dalam perkawinan menyatakan keterangan untuk menjadi WNI dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Kedua belah pihak menjadi WNA apabila pihak WNI dalam perkawinan menyatakan keterangan untuk tidak menjadi WNI. Dalam pasal 26 Undang-Undang 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Masing-masing pihak tetap memiliki kewarganegaraan dari negara asalnya.

Semua hak dan kewajiban suami istri baik dalam perkawinan biasa maupun perkawinan campuran adalah sama dan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang kewarganegaraan Nomor 6 Tahun 1958 menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. kemudian di perbarui dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa anak yang memiliki kewarganegaraan ganda harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraanya setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin.[[8]](#footnote-8)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi istri dan anak yang lahir akibat perkawinan campuran serta terpenuhinya hak-hak anak. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran juga berhak memperoleh hak-hak kewarganegaraan dan hak asasi manusia yang sama dengan anak yang lahir pada umunya.

Berdasarkan pengertian hak-hak kewarganegaraan di atas, berikut ini adalah contoh kasus dari Gloria Natapradja Hamel anak yang lahir dari perkawinan campuran yang memiliki kewarganegaraan ganda;

Dilansir dari **CNN Indonesia:** Gloria adalah paskibraka asal jawa barat yang memiliki kewarganegaraan ganda disebabkan ayahnya berkewarganegaraan perancis dan ibunya WNI. Ia dianggap kehilangan kewarganegaraan karena memiliki paspor perancis dan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. selanjutnya ibunda Gloria, Ira Hartini Natapradja Hamel mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait UU Kewarganegaraan yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam persidangan Lembaga kostitusi itu menolak seluruh permohonan ibunda Gloria karena tak beralasan menurut hukum. Sehingga Gloria harus mengikuti proses naturalisasi sesuai syarat yang berlaku dalam UU Kewarganegaraan, namun proses naturalisasi hanya berlaku untuk pasangan asing dari orang Indonesia. Bukan anak hasil perkawinan campuran.[[9]](#footnote-9)

Anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karena anak harus diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum.[[10]](#footnote-10) Anak merupakan aset utama keberlangsungan suatu bangsa, perlindungan anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak diantaranya adalah negara, pemerintahan, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Selain itu anak juga bisa dikatakan sebagai individu yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang secara unik.[[11]](#footnote-11) Oleh karena itu perundangan-undangan di Indonesia harusnya diatur mengenai anak hasil perkawinan campuran agar tidak terjadi diskriminasi hak terhadap anak hasil perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK HAK ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN YANG TINGGAL DI INDONESIA”**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran?
3. Apa Saja Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Campuran Dan Dampak Dari Perkawinan Campuran?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Mengkaji perlindungan hukum Hak-Hak anak yang lahir dari perkawinan campuran.
6. Mengkaji faktor-faktor terjadinya perkawinan campuran dan dampak dari perkawinan campuran
7. **Urgensi Penelitian**
8. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya memperluas wawasan dan pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khusunya mengenai perkawinan.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga dapat memberikan informasi dan referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya terkait topik penelitian yang sama dan bisa memperkaya pengetahuan penulis mengenai pengertian perkawinan campuran serta perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Serta memberikan solusi atau rekomendasi hukum guna meningkatkan perlindungan hak anak hasil dari perkawinan campuran memperoleh hak-hak mereka secara adil dan setara dengan anak-anak lainya.

1. **Tinjauan Pustaka**
2. Nurzakia (2017), Skripsi Berjudul : “Praktek Perkawinan Campuran Di Kota Sabang (Studi faktor dan persepsi masyarakat tentang dampak perkawinan campuran)” menjelaskan faktor-faktor terjadinya perkawinan campuran di kota sabang dan tentang persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran, serta tinjauan hukum islam terhadap pernikahan campuran.[[12]](#footnote-12)

Persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji tentang pernikahan campuran. Sedangkan perbedaan yang akan penulis tulis adalah penulis mengkaji Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan factor-faktornya serta dampak dari perkawinan campuran itu sendiri.

1. Regina Jayanti Salim (2018), Skripsi Berjudul : “Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia” Penelitian tersebut menjelaskan tentang status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1947 dan bagaimana perlindungan hukumnya.[[13]](#footnote-13)

Persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji perlindungan hukum anak dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kewarganegaraan. Sedangkan perbedaan yang akan penulis tulis adalah perlindungan hukum bagi anak hasil dari perkawinan campuran, hak-hak anak hasil perkawinan campuran dan faktor-faktor terjadinya perkawinan campuran dan dampaknya.

1. Lisa Pahruza (2023) Skripsi Berjudul : “Perlindungan Hukum Status Kewarganegaraan dari Perkawinan Campuran Antara Warga Negaea Indonesia Dengan Warga Negara Pakistan” Penelitian tersebut menjelaskan tentang Bagaimana akibat hukum perkawinan campuran dalam system hukum di Indonesia.[[14]](#footnote-14)

Persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji perlindungan hukum akibat perkawinan campuran. Sedangkan perbedaan yang penulis tulis adalah berfokus ke perlindungan hukum bagi anak yang terlahir dari perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia serta mengkaji Status kewarganegaraanya serta peneliti membahas faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya perkawinan campuran dan dampaknya.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Penelitian Kepustakaan *(Library Research)* adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini*,* Penelitian kepustakaan sendiri adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.[[15]](#footnote-15) Penelitian yang sekaligus memanfaatkan sumber daya perpustakaan untuk mendapatkan data penelitian. Dalam arti kata yang lebih sempit, penelitian perpustakaan membatasi kegiatannya hanya pada bahan perpustakaan tanpa penelitian lapangan, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sekunder.[[16]](#footnote-16)

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.[[17]](#footnote-17) Data tersebut dapat diperoleh melalui Objek penelitian yang dikaji penelitian terfokus pada literatur (kepustakaan) berupa buku-buku, peraturan perUndang-Undangan, dokumen-dokumen, baik dokumen cetak maupun elektronik dalam hal ini tentang perkawinan campuran. Sehingga dalam penelitian ini penulis dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah yang dirumuskan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah meninjau permasalahan Hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut Hukum yang berlaku).[[18]](#footnote-18) Terdapat beberapa cara yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian hukum ini, yaitu; Pendekatan Undang-Undang *(Statue Approach)*. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan Undang-Undangan yang berhubungan dengan isu yang diteliti[[19]](#footnote-19)

1. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Oleh karena itu, dalam mengolah dan menganalisis penelitian ini penulis mengutamakan penelitian kepustakaan sebagai junjungan utama dalam menyusun penelitian ini. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur dalam data sekunder, meliputi:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan dan berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut :
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Bahan Hukum Sekuder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.[[20]](#footnote-20) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:
6. Penjelasan Undang-Undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.
7. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini.
8. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.[[21]](#footnote-21) Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:
9. Kamus Hukum.
10. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Selain data sekunder penulis juga menggunakan data primer dimana data primer bersumber dari data yang dikumpulkan atau dihasilkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau narasumber yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Data ini belum pernah dianalisis atau dipublikasikan sebelumnya, dan data primer ini digunakan untuk mendukung temuan dan analisis dalam penelitian.

1. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan dipilih menjadi metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Studi Kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hal ini karena proses pembuatan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan resmi yang berhubungan dan berkaitan dalam bentuk tertulis yang disebut “bahan hukum”.

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif-analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang[[22]](#footnote-22). Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan cara pengorganisasian dan mengurutkan data pada suatu pola, kategori dan satuan. Data-data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan, diurutkan dan diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar.[[23]](#footnote-23) Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah dianalisis disajikan secara kualitatif.

1. **Sistematika Penulisan**

Rencana pelaporan penelitian ini disusun dalam empat bab yang memiliki hubungan atau korelasi pada setiap masing-masing bab. Empat bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **BAB I** **Pendahuluan**, Bab ini memuat; memuat latar belakang masalah, rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika laporan penelitian.
2. **BAB II** **Tinjauan Konseptual**. Bab ini akan menjelaskan hal dasar yang merupakan fondasi dari alasan penelitian dibuat, yang memuat tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang perkawinan campuran, dan tinjauan umum tentang perlindungan hak-hak anak.
3. **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**. Bab ini akan memuat hasil dan pembahasan yang telah dibuat berdasarkan rumusan masalah yang terdiri atas Bagaimana Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran dan Apa Saja Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan Campuran dan Dampak Dari Perkawinan Campuran.
4. **BAB IV Penutup**. Bab ini akan memuat mengenai simpulan dan saran-saran berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dan diuraikan dalam penulisan oleh penulis diakhir.

**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**
2. **Pengertian Perkawinan**

Manusia adalah makhluk sosial, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Oleh karena itu perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia. Perkawinan atau pernikahan adalah sebuah prosesi yang harus ditempuh untuk menyatukan dua manusia laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk ikatan sosial maupun ikatan hukum yang berakibat adanya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, serta merupakan syarat fitrah manusia untuk bereproduksi agar tetap hidup dan menumbuhkembangkan hubungan guna mencapai kebahagiaan keluarga.

Perkawinan juga merupakan hubungan yang dijalankan oleh pasangan suami istri untuk membentuk keluarga dan merupakan hak setiap orang dan hak tersebut telah diatur pada pasal 28 (b) ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.[[24]](#footnote-24) Ketentuan tersebut menjadi payung hukum bagi setiap orang untuk menentukan pasangan hidupnya dn membentuk suatu keluarga serta melanjutkan sesuai dengan kehendaknya serta dengan tidak adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada dasarnya perkawinan adalah persetujuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,[[25]](#footnote-25) pengertian tersebut terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ikatan Lahir dan Batin

Ikatan lahir dan batin adalah sebuah ikatan yang keduanya harus terpadu erat dan merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara pria dan wanita untuk hidup sebagai suami istri yang disebut sebagai hubungan formal.

1. Antara Seorang Pria dan Seorang Wanita

Prinsip monogami yang menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh berhubungan dengan satu perempuan dalam satu waktu juga hadir dalam situasi ini. Seorang wanita hanya bisa menikah dengan satu pria pada satu waktu dan sebaliknya

1. Sebagai Suami Istri

Seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Pasal tersebut menentukan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya.

1. Membentuk Keluarga Yang Bahagia dan Kekal

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan rukun, sedangkan orang tua memiliki tanggung jawab sebagai orang tua untuk memelihara dan mengasuh anak, agar bisa untuk mencapai hal ini, diantisipasi bahwa jika pasangan menikah, tidak akan ada lagi perceraian sampai mereka meninggal dunia.

1. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

UU No. 1 Tahun 1974 memandang perkawinan berdasakan asas kerohanian. Sebagai negara berdasarkan Pancasila dimana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai unsur lahir/jasmani dan rohani bagi pasangan.

Berdasarkan penjelasan UU Perkawinan diatas, UU tersebut mengatur tentang aturan perkawinan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan di Indonesia dan tidak mengesampingkan keberlakuan hukum adat perkawinan yang berlaku dalam kehidupan suatu masyarakat tertentu.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan adalah akad yang kuat untuk menaati perintah allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. Selain itu, islam juga menegaskan bahwa pernikahan merupakan komitmen yang teguh dan perjanjian yang kokoh antara kedua pasangan. Agar komitmen dan perjanjian tersebut menjadi kokoh selamanya, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam perkawinan.[[26]](#footnote-26) Diantaranya:

1. Prinsip Mitsaqan Ghazila (komitmen suci)

Merupakan cara yang Tuhan sediakan bagi manusia untuk bereproduksi, memiliki anak, dan menjaga keselamatan hidup mereka sebagai sepasang suami istri.

1. Prinsip Mawaddah Wa Rahmah (cinta dan kasih sayang)

Mawaddah secara Bahasa berarti “cinta kasih” sedangkan rahmah berarti “kasih sayang”, kedua istilah tersebut menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur. Prinsip ini adalah prinsip yang paling penting, yang harus dimiliki oleh suami istri dalam berkeluarga.

1. Prinsip Mu’asyarah Bil Ma’ruf (perilaku santun dan beradab)

Adalah perkawinan yang mengembangkan hubungan positif antara suami dan istri dan dengan anggota keluarga lainya. Dengan memperindah ucapan, perilaku dan perbuatan, serta adil dalam segala hal terutama nafkah.[[27]](#footnote-27)

1. Prinsip Musawah (kesetaraan)

Adalah prinsip yang berarti tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya

1. Prinsip Musyawarah (komunikasi yang hangat)

Menghormati adanya pendapat yang berbeda dari masing-masing kedua pasangan suami istri, serta mencari titik temu dari pendapat-pendapat yang diungkapkan secara adil dan bijaksana dengan menerima keputusan Bersama secara besar hati.

Berdasarkan pengertian perkawinan diatas, kompilasi hukum islam merupakan kumpulan hukum islam yang berlaku di Indonesia, dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi umat islam dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari.

1. **Syarat Sah Perkawinan**

Dalam perkawinan terdapat syarat-syarat yang merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu akan sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 Ayat (1) menyatakan perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Perkawinan apabila bertentangan dengan hukum maka menurut Undang-Undang perkawinan dianggap tidak sah. Karena itu UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdapat syarat dan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia perlu diatur syarat-syarat tertentu agar tujuan perkawinan tercapai, yaitu sebagai berikut:

1. Persetujuan Dari Kedua Calon Mempelai

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dalam Undang-Undang perkawinan telah dijelaskan bahwa jika ingin melangsungkan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa agar suami istri yang akan menikah itu dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

1. Perkawinan Dilakukan Sesuai Hukum Masing-Masing Agama

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan yang dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dikenal sebagai “perkawinan agama” contohnya;

1. Islam diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dan dilaksanakan oleh pengadilan agama.
2. Kristen diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dilaksanakan oleh Gereja Kristen.
3. Katolik diatur oleh Kanon Hukum dan dilaksanakan oleh Gereja Katolik.
4. Hindu diatur oleh Hukum Hindu dan dilaksanakan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia.
5. Buddha diatur oleh Hukum Buddha dan dilaksanakan oleh Perwakilan Umat Budhha Indonesia.

Dengan syarat kedua belah pihak harus beragama, memenuhi syarat usia, tidak ada hubungan darah, tidak ada pernikahan sebelumnya, dan adanya wali/saksi.

1. Perkawinan Dicatat Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Perkawinan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat muslim, dan di Kantor Catatan Sipil bagi umat non-muslim.[[28]](#footnote-28)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga menyebetukan Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang sah secara perdata. Perkawinan dalam KUHPerdata tidak mempertimbangkan unsur agama. Namun dalam KUHPerdata terdapat juga syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak harus menyetujui perkawinan

Pasal 28 KUHPerdata yang berbunyi perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri.

1. Tidak ada larangan perkawinan menurut Undang-Undang
2. Tidak melanggar larangan perkawinan berdasarkan hubungan darah atau susuan.
3. Tidak melanggar larangan perkawinan berdasarkan peraturan lain atau agama.
4. Jika salah satu pihak pernah menikah sebelumnya, maka harus menunggu 300 hari setelah perkawinan sebelumnya berakhir
5. Suami harus mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya.
6. Suami harus berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.
7. **Asas-Asas Perkawinan**

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, didalamnya terdapat berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan,[[29]](#footnote-29) Yaitu;

1. Asas Sukarela : dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua pasangan maupun orang tua pasangan yang melakukan perkawinan yang bertugas sebagai wali.
2. Asas Persetujuan : asas ini merupakan asas konsekuensi daripada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada wanita yang akan menikah atau dinikahkan. Jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan bisa di batalkan.
3. Asas Bebas Memilih : seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkanya perkawinan dan memilih seseorang yang ia sukai.
4. Asas Kemitraan : adanya asas ini karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat.
5. Asas Selamanya : Asas ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka Panjang antara seorang laki-laki dan perempuan.
6. Asas Monogami Terbuka : Undang-Undang Perkawinan mengatur hal ini tapi hal ini tidak bersifat mutlak. Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 Ayat (1) menyatakan seorang suami hanya di ijinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. Hal ini dikatakan tidak mutlak karena asas ini memiliki tujuan untuk mempersempit terjadinya poligami, bukan melarang atau menghapus poligami.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan suatu prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas- asa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

1. Asas Perkawinan Kekal

Setiap perkawinan berutjuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Asas perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama Atau Kepercayaan

Perkawinan hanya sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

1. Asas Perkawinan Terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu akan mempunyai kekuatan hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Tujuan Perkawinan**

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu juga dengan perkawinan, perkawinan bukan hanya sekedar untuk mempersatukan hubungan laki-laki dan permpuan, namun ada beberapa tujuan dari sebuah perkawinan, diantaranya:

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang.[[30]](#footnote-30) Hal ini adalah sebagai tujuan yang utama perkawinan, karna untuk mendapatkan keturunan yang sah harus melalui perkawinan yang sah juga menurut UU yang berlaku.
2. Untuk membangun keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang, atau disebut juga keluarga yang Sakinah, Mawwadah, dan Rahmah.[[31]](#footnote-31)
3. Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.[[32]](#footnote-32) Setiap manusia mempunyai nafsu syahwat yang perlu disalurkan dengan baik, maka perkawinan merupakan salah satu cara dalam penyaluran biologis secara sah.
4. Melahirkan keturunan atau generasi yang baik, hikmah dalam perkawinan adalah melahirkan anak-anak yang baik, berkualitas dalam iman dan takwa, cerdas secara emosional maupun intelektual. Sehingga dengan perkawinan, orang tua akan bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya sebagai generasi yang baik dan bertakwa kepada Tuhanya.
5. Perkawinan juga bertujuan untuk menentramkan jiwa, karena seorang istri akan merasa tentram jiwanya karena ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga, suami pun akan merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, menumpahkan perasaan suka dan duka, serta teman bermusyawarah.

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua. Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan antara suami istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut pihak-pihak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin rohani yang mempunyai peranan yang penting. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,untuk itu suami istri perlu saling membantu untuk melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya guna mencapai kesejahtearaan dalam perkawinan. selain itu, menurut UU No 1 Tahun 1974 ada beberapa tujuan yaitu tujuan utama, tujuan hukum, dan tujuan agama, sebagai berikut:

1. Tujuan Utama
2. Membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia
3. Meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan hidup.
4. Mengembangkan kehidupan yang seimbang dan harmonis.
5. Tujuan Sosial
6. Membangun masyarakat yang stabil dan harmonis.
7. Mengembangkan nilai-nilai moral dan etika.
8. Meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab bagi kedua pasangan.
9. Tujuan Agama
10. Membentuk keluarga yang beriman dan bertakwa.
11. Mengembangkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga.
12. Meningkatkan kesadaran spiritual bagi kedua pasangan.

Tujuan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 31 Adalah:

1. Tujuan Utama
2. Membentuk ikatan perkawinan yang sah dan resmi.
3. Membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan stabil.
4. Mengembangkan kehidupan Bersama yang seimbang dan bahagia.
5. Tujuan Hukum
6. Mengatur hak dan kewajiban suami istri.
7. Mengatur hubungan keluarga dan waris.
8. Melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Selain itu, tujuan perkawinan menurut KUHPerdata adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan juga merupakan urusan pribadi yang dijanjikan, tanpa tendensi ketuhanan

Para ahli pun berpendapat mengenai tujuan dari perkawinan, yakni;

1. Soemiyati

Menurut soemiyati tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan kodrat manusia antara hubungan laki-laki dan perempuan guna membangun keluarga yang bahagia dan harmonis atas dasar cinta dan kasih sayang.[[33]](#footnote-33) Yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
2. Untuk memenuhi tuntunan hajat manusia.
3. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Memperbesar rasa tanggung jawab
6. Alimuddin (2014)

Tujuan perkawinan adalah untuk menghindari kemaksiatan dan perzinahan serta untuk mendapatkan keturunan yang sah agar dapat melanjutkan generasi yang baik dimasa yang akan datang.

1. Hilman HadiKusuma

Tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian serta mempertahankan kewarisan.[[34]](#footnote-34)

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan.

1. **Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran**
2. **Pengertian Perkawinan Campuran**

Manusia memiliki hak untuk menikah, membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta melanjutkan keturunan. Termasuk untuk melakukan sebuah perbuatan/peristiwa hukum yang dikategorikan sebagai pernikahan campuran. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh pendapat mayoritas ulama yang membolehkan laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita ahli kitab sedangkan yang dimaksuddengan pernikahan campuran pada saat ini bukan hanya melibatkan pasangan yangmenikah berbeda agama saja melainkan pasangan yang menikah berbeda kewarganegaraan.[[35]](#footnote-35)

Perkawinan campuran adalah perkawinan antar individu yang berasal dari latar belakang budaya, agama, atau ras yang berbeda. Dalam hal ini pasangan yang terlibat dalam perkawinan campuran mungkin memiliki perbedaan tradisi, nilai-nilai, Bahasa, atau keyakinan. Perkawinan campuran terdiri dari dua kata yaitu “Perkawinan” dan “Campuran” makna perkawinan jika disusuli dengan kata campuran akan menjadi ungkapan yang memiliki makna tertentu di dalam perundang-undangan republik Indonesia.[[36]](#footnote-36)

Perkawinan campuran secara hukum adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak yang berbeda domisilinya terhadap masing-masing pihak yang memiliki sistem hukum berbeda. Menurut kaidah hukum Indonesia melalui pasal 57 UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dianggap demikian apabila para pihak memiliki kewarganegaraan/ nasionalitas yang berbeda.[[37]](#footnote-37) Dua orang yang berbeda domisilinya akan menyebabkan berlakunya kaidah hukum internasional dari dua sistem hukum yang berbeda. Berdasarkan definisi Pasal 57 UU Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut:

1. Perkawinan seorang pria dan wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada Hukum yang berlaku;
3. Adanya perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkan perkawinan. Sedangkan perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, uku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga, yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat menyatakan salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan campuran memiliki bebrapa ciri-ciri khusus yang membedakan dengan perkawinan pada umumnya. Berikut adalah ciri umum perkawinan campuran.[[38]](#footnote-38) Yakni:

1. Keberagaman etnis dan budaya; Pasangan dalam perkawinan campuran berasal dari kelompok etnis atau budaya yang berbeda. Keberagaman ini mencakup perbedaan dalam tradisi, bahasa, adat istiadat, serta normanorma sosial.
2. bahasa yang beragam; penggunaan beragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Selain itu, anak-anak mungkin tumbuh dengan pemahaman dan penggunaan lebih dari satu Bahasa
3. Akulturasi dan integrasi budaya; terjadi proses akulturasi di mana  
   pasangan mengintegrasikan unsur-unsur budaya satu sama lain, serta serta adanya penerimaan dan adopsi norma-norma budaya dari pasangan
4. Kesadaran dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam perkawinan campuran, terdapat kesadaran yang tinggi terhadap perbedaan budaya dan etnis antara pasangan, serta adanya penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai masing-masing pasangan.
5. Penerimaan dan tantangan dari masyarakat. Perkawinan campuran  
   mungkin dihadapi dengan penerimaan atau tantangan dari masyarakat sekitar. Juga adanya pengaruh pandangan masyarakat terhadap stabilitas dan keberhasilan perkawinan
6. Proses akulturasi anak. Anak-anak yang terlahir dari pernikahan  
   campuran mengalami proses akulturasi pada pembentukan identitas mereka, dan mampu mengatasi identitas ganda dan memahami keberagaman sebagai kekayaan.
7. Tantangan komunikasi dan penyesuaian. Terdapat tantangan dalam komunikasi karena perbedaan bahasa dan gayakomunikasi serta proses penyesuaian terhadap perbedaan budaya untuk menciptakan harmoni dalam rumah tangga.
8. Perbedaan agama. Dalam beberapa kasus, perkawinan campuran  
   melibatkan pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda.  
   Penanganan harmonisitas dalam perbedaan keyakinan dan praktik  
   keagamaan juga seringkali ada.
9. Pentingnya fleksibilitas dan kompromi. Salah satu kunci kesuksesan  
   perkawinan campuran yang menjadi cirinya adalah adanya fleksibilitas dan kemampuan untuk berkompromi. Terjadi keterbukaan terhadap perubahan dan adaptasi terhadap kebutuhan dan nilai-nilai bersama.
10. Pembentukan identitas keluarga unik. Dalam perkawinan campuran, terbentuknya identitas keluarga yang unik, yang mencerminkan perpaduan dan integrasi unsur-unsur dari masing masing pasangan, serta adanya kesadaran akan kekayaan keberagaman dan keunikannya.
11. Perkawinan campuran menawarkan kesempatan untuk memahami dan merayakan keberagaman, tetapi juga menuntut keterbukaan, toleransi, dan komunikasi yang baik agar dapat mengatasi tantangan yang mungkin muncul.

Jadi perkawinan campuran adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Dikarenakan berlainan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku juga berlainan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran.

1. **Syarat Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, di mana salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Adapun syarat-syarat perkawinan campuran di Indonesia adalah:

1. Persetujuan kedua calon mempelai.
2. Izin dari kedua orang tua jika mempelai belum berusia 21 tahun.
3. Surat pernyataan belum pernah menikah.
4. Surat pengantar dari pejabat sekitar.
5. Surat ijin menikah dari kedutaan (asli)
6. Akta kelahiran
7. Passport dan visa
8. Dan STDM (surat tanda melapor diri dari polres)

Selanjutnya dalam Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan dalam beberapa ayat tentang ketentuan dan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan campuran, yang harus dipenuhi oleh instansi yang berwenang menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak tersebut. Misalnya adanya surat keterangan tentang persyaratan perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak atau pejabat masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan campuran. Dalam hal ini apabila terjadi penolakan dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan persyaratan perkawinan campuran, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta keputusan dari Pengadilan untuk memberikan pertimbangan hukum.

1. **Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Perlindungan Anak**
2. **Pengertian Tentang Anak**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa.  
Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.[[39]](#footnote-39)

Selain itu, Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi, agar kelak dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa. Dalam hal ini anak adalah keturunan atau generasi penerus dari orang tua, dan manusia yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dan individu yang belum mencapai usia dewasa.[[40]](#footnote-40)

Membahas tentang pengertian anak, berikut adalah beberapa pengertian anak dari berbagai sumber, yakni:

1. Menurut Undang Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU ini mengatur tentang perlindungan anak, tanggung jawab orang tua, dan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, anak juga diakui sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan, dan perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Anak juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak tanpa membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin.[[41]](#footnote-41)

Undang-Undang Perlindungan Anak memandang anak dalam berbagai perspektif. Hal ini terlihat dalam konsideran “menimbang” yang terdapat dalam Undang-Undang ini, yang melihat kedudukan anak sebagai;

1. bagian dari warga negara Republik Indonesia, yang berhak atas perlindungan memperoleh hak-hak asasinya;
2. amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
3. dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

Dengan demikian, pengertian anak yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini adalah seseorang sebagai individu masyarakat, yang belum mencapai usia dewasa. Jadi, pengertian anak yang dimaksud di sini bukan pengertian anak dalam hubungan keluarga, yaitu seseorang yang lahir sebagai akibat adanya perkawinan. Dalam Undang-Undang ini, anak dilihat dalam perspektif sosial secara umum, sehingga merupakan individu yang hidup dalam wilayah publik, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sebagai amanah Tuhan, dan sebagai generasi penerus bangsa; bukan anak dalam perspektif hubungan keluarga, yang berada pada wilayah domestik.[[42]](#footnote-42)

1. Pengertian Anak Dalam Islam

Pengertian anak dalam agama islam adalah seseorang yang belum *baligh* atau dewasa menurut hukum islam. Dalam ketentuan hukum islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa *baligh*. Seseorang dikategorikan sudah *baligh* ditandaidengan perubahan badaniah atau bentuk tubuhnya, baik terhadap laki-laki dan perempuan. Seorang pria dikatakan sudah baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang di alami oleh laki-laki dewasa. Sedangkan seorang perempuan dikatakan sudah *baligh* apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.[[43]](#footnote-43)

Anak dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang harus diurus dan dibesarkan oleh orang tua atau wali yang bertanggung jawab. Dalam islam anak memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh walinya, seperti kasih sayang, Pendidikan, agama dan moral, serta perlindungan dari segala bentuk bahaya. Selain itu, anak juga memiliki kewajiban sebaliknya, harus taat kepada kedua orang tua serta menjaga hubungan baik dengan mereka. Oleh karena itu, dalam pandangan islam, penting bagi orang tua untuk memberikan Pendidikan dan contoh yang baik kepada anak agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang taat kepada Allah dan bermanfaat bagi agama, bangsa dan masyarakat.

Dengan demikian pengertian anak pada umumnya adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan yang belum pernah kawin, pada beberapa perundang-undangan di Indonesia Batasan kedewasaan seseorang berbeda-beda. Berbedaan tersebut tergantung dari sudut manakah dilihat dan ditafsirkan, apakah ada sudut pandang kesejahteraan atau dari sudut pandang lainya.[[44]](#footnote-44)

1. **Hak dan Perlindungan Anak**

Hak dan perlindungan anak adalah hak-hak yang dimiliki anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan aman dan terlindungi. Perlindungan anak bertujuan agar anak dapat hidup dengan baik, berakhlak mulia, dan sejahtera.[[45]](#footnote-45) Hak-Hak Anak meliputi:

1. Hak Hidup

Hak Hidup adalah Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan tidak boleh dibunuh. Hak ini merupakan hak fundamental yang mengatur hak-hak lain. Hak hidup diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup dan mempertahankan hidupnya.

1. Hak Tumbuh Kembang

Hak tumbuh kembang anak adalah hak anak untuk berkembang secara fisik, mental, spiritual, sosial, dan moral. Hak ini dijamin dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak. Pemenuhan hak tumbuh kembang anak harus diutamakan sejak dalam kandungan. Orang tua berperan penting dalam memenuhi hak-hak tersebut.

1. Hak Perlindungan dari Kekerasan, Eksploitasi, dan Diskriminasi

Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi adalah hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hak ini berlaku untuk semua orang, termasuk anak-anak. Hak ini meliputi :

1. Pasal 28I ayat (2) yang mengatur bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan mendapatkan perlindungan
2. Pasal 28B ayat (2) yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
3. Pasal 28D ayat (1) yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hokum
4. Hak Atas Pendidikan

Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan kesempatan belajar sepanjang hayat. Hak ini dijamin secara hukum dan berlaku tanpa diskriminasi. Di Indonesia, hak atas pendidikan dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah juga diwajibkan untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas pendidikan.  Hak atas Pendidikan mencangkup:

1. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang gratis dan wajib
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan menengah yang tersedia dan dapat diakses
3. Hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kapasitas
4. Hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas baik di sekolah negeri maupun swasta
5. Hak untuk memilih sekolah sesuai dengan keyakinan agama dan moral.
6. Hak untuk mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan
7. Hak untuk mendapatkan fasilitas belajar yang mumpuni
8. Hak untuk mendapatkan lingkungan sekolah yang sama
9. Hak Atas Kesehatan

Hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia yang menjamin setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Hak ini diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Hak atas kesehatan mencakup:

1. Hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat
2. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
3. Hak untuk bebas dari layanan kesehatan yang tidak semestinya
4. Hak untuk mendapatkan sistem perlindungan kesehatan yang setara
5. Perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak

Pemerintah wajib menyediakan sarana dan fasilitas kesehatan yang layak dan mudah diakses oleh masyarakat. Pengabaian hak atas kesehatan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

1. Hak Atas Ekspresi

Hak atas ekspresi adalah hak untuk mengekspresikan pendapat dan keyakinan secara bebas. Hak ini dapat dilakukan melalui tulisan, gambar, kata-kata, dan cara-cara tertentu. Selain itu, hak atas ekspresi juga dapat merujuk pada hak atas kekayaan intelektual (HKI) atas ekspresi budaya tradisional. HKI adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual.

1. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-3, Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2011, hlm 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2017, hlm 58. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV.Nuansa Aulia, 2020, hlm. 74 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm 460. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zal, S.R., “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Antar Warga WNI Dengan WNA Terhadap Status Personal Anak” Warta Dharmawangsa, Vol. 17, No. 3, (2023), hlm. 1069-1080 [↑](#footnote-ref-6)
7. Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke-1, Bandung : PT. Refika Aditama, 2016, hlm 16. [↑](#footnote-ref-7)
8. David Setyawan “ Status Hukum Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran” (2014), <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/status-hukum-kewarganegaraan-anak-hasil-perkawinan-campuran>. Diakses Pada 06 Desember 2024 Pukul 13.00 WIB [↑](#footnote-ref-8)
9. Priska Sari Pratiwi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170901062211-20-238810/cerita-gloria-natapradja-soal-kewarganegaraan-ganda>, Diakses Pada 08 Januari 2025 Pukul 13.00 WIB [↑](#footnote-ref-9)
10. Amran Suadi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018, hlm 46 [↑](#footnote-ref-10)
11. Husnul abdi, <https://www.liputan6.com/hot/read/55130130/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional>. Diakses Pada 07 Desember 2024 [↑](#footnote-ref-11)
12. Nurzakia, “Praktek Perkawinan Campuran Di Kota Sabang”. Skripsi Fakultas Hukum Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017. [↑](#footnote-ref-12)
13. Regina Jayanti Salim. “Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2018. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lisa Pahruza. “Perlindungan Hukum Status Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Pakistan”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023. [↑](#footnote-ref-14)
15. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm. 107 [↑](#footnote-ref-15)
16. Mestika Zed, *Metode penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1, 2008, Hlm.1-2. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*, hlm.19 [↑](#footnote-ref-17)
18. Achmad Irwan Hamzani, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, hlm. 2-3.. [↑](#footnote-ref-18)
19. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum”, Kencana Pranata Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 93 [↑](#footnote-ref-19)
20. Johnny Ibrahim*, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2012, hlm. 392. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-21)
22. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005, hlm 44 [↑](#footnote-ref-22)
23. Zainudin Ali, *Op cit*, hlm. 10 [↑](#footnote-ref-23)
24. Tim Hukum Online, “Pasal 28b sampai 28j UUD 1945 Republik Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/> Diakses Pada 12 Januari 2025 Pukul 13.00 WIB [↑](#footnote-ref-24)
25. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia; Menurut Perundangan Hukum dan Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm 10. [↑](#footnote-ref-25)
26. Mulia M, “Prinsip-Prinsip Perkawinan Islam”, Alamtara Istitute, 2020. https//alamtara.co/2020/07/25/prinsip-prinsip-perkawinan-islam-1--, Diakses Pada 14 Januari 2025 Pukul 11.00 WIB [↑](#footnote-ref-26)
27. Farkhan Muhammad, “Konsep Mu’asyarah Bil Maruf Prespektif Al-Quran Surat An-nisa Ayat 19” *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyyah*, Volume 1 No.2, 2022, hlm 1 [↑](#footnote-ref-27)
28. DISDUKCAPIL Penajem, ”Akta Perkawinan” <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-perkawinan>. Diakses Pada 15 Januari 2025 Pukul 08.00 WIB [↑](#footnote-ref-28)
29. Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan,* Malang: UMM Press, 2020, hlm 7 [↑](#footnote-ref-29)
30. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 46 [↑](#footnote-ref-30)
31. I*bid*, hlm 47 [↑](#footnote-ref-31)
32. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2002, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-32)
33. Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2017 hlm 60 [↑](#footnote-ref-33)
34. Hilman Hadikusuma, op.cit., hlm 21-22 [↑](#footnote-ref-34)
35. Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Depok: PT.  
    Rajawali Buana Pustaka, 2021) hlm. 95 [↑](#footnote-ref-35)
36. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 48. [↑](#footnote-ref-36)
37. Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan_campuran>. Diakses Pada 14 Januari 2025 Pukul 14.00 [↑](#footnote-ref-37)
38. Naswar, Status Anak Dalam Perkawinan Campuran: Kewajiban Negara dan Perlindungan Hukum. *Jurnal Litigasi*, Vol. 25, Oktober 2024, hlm 108 [↑](#footnote-ref-38)
39. Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018, hlm 11 [↑](#footnote-ref-39)
40. Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia,* Jakarta Timur: Prenamedia Group, 2018, hlm 46 [↑](#footnote-ref-40)
41. Husnul Abdi, Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang dan Organisasi Internasional. https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional. Diakses Pada 16 Januari 2025 Pukul 13.00 WIB [↑](#footnote-ref-41)
42. Hani Sholihah, Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, *Jurnal Al-Afkar*, volume 1 No 2, juli 2018, hlm 10 [↑](#footnote-ref-42)
43. Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam.* Palembang: Noerfikri Offset, 2015, hlm 67 [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid*, hlm 62. [↑](#footnote-ref-44)
45. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, “Hak-Hak Anak Dalam Rumah Tangga”, <http://jdih.baritoutarakab.go.id/berita/baca/hak-hak-anak-dalam-rumah-tangga>. Diakses Pada 16 Januari 2025 Pukul 12.00 WIB [↑](#footnote-ref-45)